

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 20 Mei 2023

Disetujui : 9 Juli 2023

GEOGRAFI

IDENTIFIKASI TINGKAT KELAYAKAN HUNI PERMUKIMAN KELURAHAN DALAM BUGIS BERDASARKAN KONDISI BANGUNAN GEDUNG DAN DRAINASE LINGKUNGAN**Inda Purnama¹, Agus Sugiarto^{1*}, Sulistyarini²**¹ Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Tanjungpura¹ Program Studi Pendidikan Ilmu Sosial, FKIP, Universitas Tanjungpura✉ *agusnepster@fkip.untan.ac.id

Abstrak. Perkembangan suatu wilayah yang sangat dinamis membawa dampak bagi pola kehidupan masyarakat utamanya adalah permasalahan kebutuhan kawasan permukiman. Salah satu permasalahan pembangunan permukiman adalah kelayakan huni suatu permukiman. Kelayakhunian permukiman dinilai berdasarkan Formula Penilaian Lokasi Permukiman yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2018. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sebaran tingkat kelayakan huni berdasarkan aspek kondisi bangunan gedung dan drainase lingkungan di permukiman Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan unit analisis kelurahan. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran permukiman di Kelurahan Dalam Bugis berdasarkan aspek Kondisi Bangunan menunjukkan bahwa 79% (144,21 ha) masuk pada kategori kumuh ringan sehingga layak huni dan 21% (38,73 ha) masuk pada kategori kumuh sedang sehingga cukup layak huni. Sedangkan pada aspek Kondisi drainase lingkungan permukiman Kelurahan Dalam Bugis menunjukkan bahwa 60% (98,08 ha) masuk pada kategori sebagai kumuh ringan sehingga layak huni dan 40% (65,83 ha) masuk pada kategori kumuh sedang sehingga cukup layak huni.

Kata Kunci: Permukiman, bangunan, drainase

Abstract. The development of a very dynamic area impacts the pattern of people's lives, especially the problem of the needs of residential areas. One of the problems of settlement development is the feasibility of a settlement. The habitability of settlements is assessed based on the Settlement Location Assessment Formula stipulated in the Regulation of the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia Number 14/PRT/M/2018. This study aims to provide information on the distribution of habitability levels based on aspects of building conditions and environmental drainage in the settlements of Dalam Bugis Village, East Pontianak District, Pontianak City. The form of this research is descriptive with a qualitative approach. The research location is in the Village of Dalam Bugis, East Pontianak District, Pontianak City, with a village analysis unit. Methods of data collection by observation, interviews and documentation, as well as analysis techniques by data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the distribution of settlements in Kelurahan Dalam Bugis based on the aspect of Building Conditions showed that 79% (144.21 ha) were in the category of mild slums so that they were livable, and 21% (38.73 ha) were in the class of moderate slums so that they were pretty comfortable. Meanwhile, in the drainage condition aspect of the settlement environment of the Dalam Bugis Village, it shows that 60% (98.08 ha) fall into the category of mild slums so that they are livable, and 40% (65.83 ha) fall into the category of moderate slums so that they are pretty comfortable.

Keywords: Settlement, building, drainage

PENDAHULUAN

Permukiman dan perumahan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah (Kartika Puspa Dewi 2019). Perkembangan suatu wilayah yang sangat dinamis membawa dampak bagi pola kehidupan masyarakat utamanya adalah peningkatan kebutuhan kawasan permukiman (Wiarni, Mononimbar, and Supardjo 2018). Permukiman adalah suatu area di permukaan bumi yang ditinggali manusia dengan segala sarana penunjangnya yang merupakan kesatuan sebagai tempat tinggal (Sumaatmadja 1998). Permukiman yang layak akan berimbang pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Ritonga 2019). Kawasan permukiman dikatakan *livable* apabila dapat memberikan akomodasi kebutuhan masyarakat untuk tinggal dan hidup secara nyaman serta bersosialisasi dengan baik (Widyawati 2015). Beberapa parameter yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi permukiman antara lain penggunaan lahan, kemiringan lahan, kerawanan pencemaran, bentuk lahan, jarak dengan jalan utama, jarak dengan layanan ekonomi, kedalaman air tanah dan drainase (Rusmawan 2018).

Salah satu indikator dari kualitas permukiman dapat dilihat dari tingkat kelayakan huni suatu lokasi perumahan. Permukiman kumuh identik dengan kondisi fisik hunian yang berkaitan dengan lingkungan yang buruk. Sebagai contoh kualitas fisik hunian adalah penggunaan kualitas material bangunan yang rendah dalam membangun rumah dan struktur bangunan yang membahayakan (Oktarini and Lusetyowati 2022). Setiap pemukim memiliki persepsi tersendiri berkaitan terhadap kualitas lingkungan sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi kebanyakan permukiman kumuh mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan bangunan dan lingkungan yang sama (Shahraki et al. 2020). Permasalahan permukiman kumuh telah menjadi masalah yang belum terpecahkan dari tahun ke tahun (Hariyanto 2017). Kecenderungan masyarakat mendirikan hunian di lahan-lahan secara ilegal dan mengabaikan ketentuan dasar perumahan seperti jarak antar

rumah, kualitas material bangunan menjadikan lingkungan menjadi kumuh (Alfiani 2016).

Selain itu keadaan ekonomi menyebabkan masyarakat bermukim ditempat yang tidak seharusnya, bahkan rumah tidak saja berfungsi sebagai tempat beristirahat dan tinggal tetapi pada kenyataannya juga berfungsi untuk mendukung kegiatan industrial, agrikultural maupun kegiatan komersial lainnya, dan cenderung diisi lebih dari satu keluarga (Rashid 2019). Selaras dengan apa yang disampaikan Rashid alih fungsi rumah tidak hanya berbicara faktor fisik semata tetapi faktor sosial budaya juga menjadi faktor yang berpengaruh (Rapoport 1969).

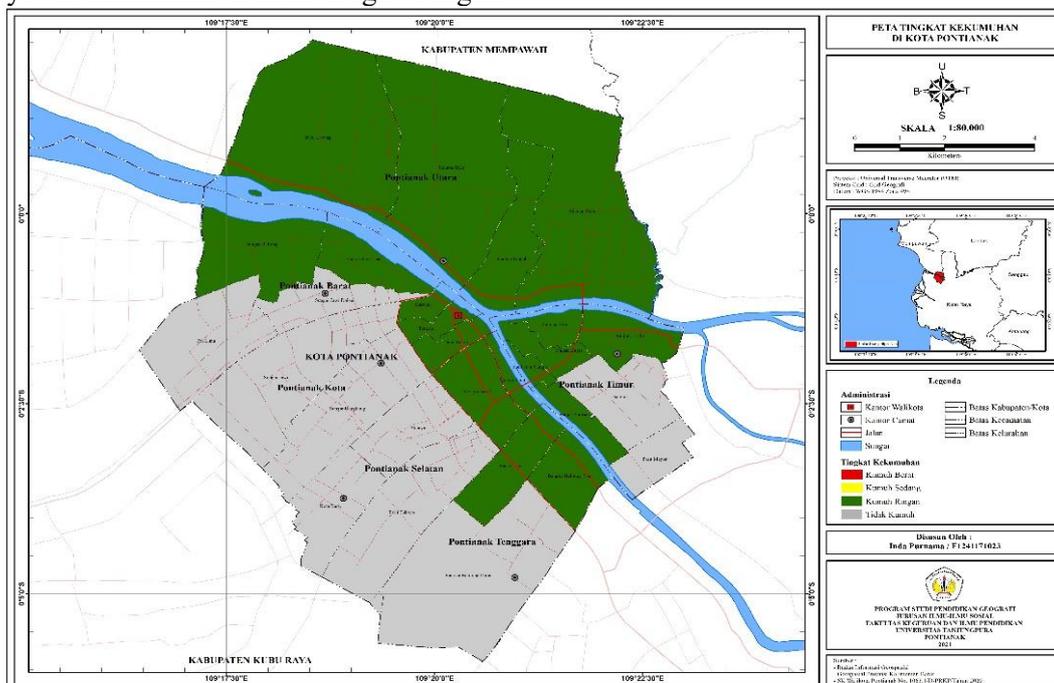
Banyak variabel signifikan yang menjadi penyebab kondisi kumuh pada lingkungan permukiman dapat digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan suatu lokasi permukiman (Akbar and Novira 2019). Kaitannya dengan penelitian ini penetapan lokasi permukiman dan perumahan kumuh dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi serta penilaian lokasi yang didasarkan pada kondisi kekumuhan dan legalitas tanah (Menteri PUPR 2018). Di dalam Peraturan Menteri PUPR tersebut menyatakan bahwa upaya mengidentifikasi tingkat kekumuhan permukiman dan perumahan dilakukan dengan menemukenali permasalahan keadaan bangunan gedung beserta dukungan sarana dan prasarana lainnya berdasarkan formula penilaian dan menentukan skala prioritas penanganannya (Menteri PUPR 2018). Penilaian kelayakan huni kawasan permukiman digolongkan kedalam 3 tingkatan yaitu tidak layak huni (kumuh berat), cukup layak huni (kumuh sedang), dan layak huni (kumuh ringan). Penilaian layak huni permukiman dapat dilihat berdasarkan aspek kondisi bangunan gedung dan drainase lingkungan.

Penilaian lokasi permukiman berdasarkan aspek kondisi bangunan gedung dinilai berdasarkan 3 kriteria/golongan yaitu tingkat kepadatan bangunan, keteraturan bangunan, dan ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan. Kriteria keteraturan bangunan dinilai berdasarkan indikator kesesuaian posisi muka bangunan hunian menghadap ke jalan dan kesesuaian posisi

muka bangunan tidak menghadap langsung atau berada di atas sempadan sungai/laut/kanal/danau dan atau rawa. Kriteria tingkat kepadatan bangunan dinilai berdasarkan ketidaksesuaian kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi yaitu untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha. Kriteria ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan dinilai berdasarkan indikator kebocoran atap, kerusakan dinding dan lantai yang masih berupa tanah. Melalui pendekatan keruangan penelitian ini menitikberatkan pada fenomena geografi yaitu hubungan aktivitas dan karakteristik regional penduduk di Kecamatan Pontianak Timur khususnya di Kelurahan Dalam Bugis dengan

fokus pada aspek kondisi bangunan gedung dan aspek kondisi drainase lingkungan.

Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota Kota Pontianak secara astronomi berada pada 109⁰16'25" sampai 109⁰23'04" BT serta 00⁰2'24" LU dan 00⁰5'37" LS (BPS Kota Pontianak 2022). Kota Pontianak memiliki total luas wilayah 118,31 km² dengan 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Walikota Pontianak telah menetapkan Area Kumuh Perumahan dan Permukiman, di Kota Pontianak seluas 150,16 Ha (Walikota Pontianak 2020). Peta dibawah menunjukkan tingkat kelayakan huni permukiman di Kota Pontianak tahun 2020.



Gambar 1. Peta Tingkat Kekumuhan Kota Pontianak Tahun 2020

Peta diatas mendeskripsikan persebaran tingkat kelayakan huni permukiman di Kota Pontianak. Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur yang diidentifikasi yaitu kawasan dengan nama lokasi Kawasan Kampung Tua, Gang Bone dan Gang Sampang Madura serta diidentifikasi dengan 7 aspek kondisi serta 16 kriteria penilaian. Identifikasi tersebut tidak dilakukan menyeluruh keseluruhan kawasan yang berada di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur dan tidak fokus ke aspek kondisi tertentu. Hal ini dianggap peneliti masih kurang, dan harus dilakukan identifikasi

secara keseluruhan serta dilakukan identifikasi dengan fokus aspek kondisi tertentu, seperti aspek kondisi bangunan gedung dan drainase lingkungan.

Kajian pra riset yang telah dilakukan pada lokasi penelitian dari aspek kondisi bangunan Gedung, Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak cenderung tidak teratur. Kondisi ini ditandai dengan adanya permukiman yang berhadapan langsung dengan sempadan sungai dan berada di atas sempadan sungai. Permukiman yang berhadapan langsung dengan sempadan sungai dan berada di atas

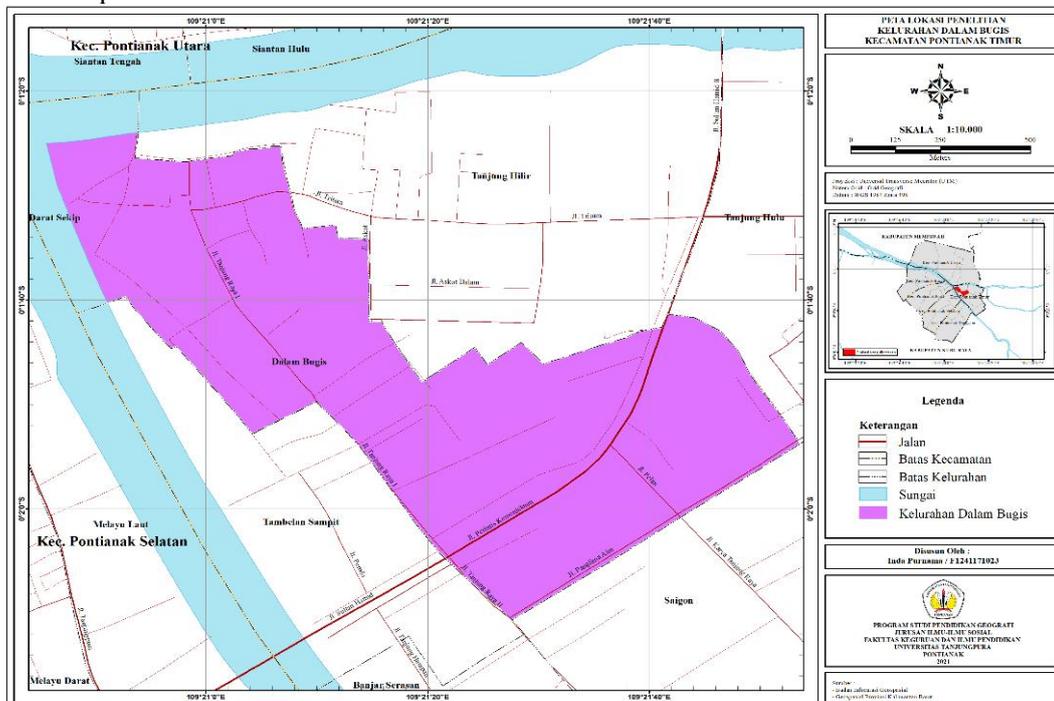
sempadan sungai ini tidak sejalan dengan (Menteri PUPR 2016). Aspek kondisi drainase (genangan) lingkungan di permukiman Kelurahan Dalam Bugis merupakan drainase alamiah (natural drainage), yaitu drainase alamiah berupa parit-parit dan sungai. Dilihat dari aspek kondisi pengelolaan air limbah di permukiman Kelurahan Dalam Bugis tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu masih terdapat kakus/toilet yang tidak terhubung dengan tangki septik.

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti mencoba melakukan identifikasi kelayakan huni permukiman yang bertujuan mengetahui tingkat kelayakan huni permukiman di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi mengenai sebaran tingkat kelayakan huni berdasarkan aspek kondisi bangunan gedung dan drainase lingkungan di permukiman Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menggunakan Formula Penilaian Lokasi Permukiman PUPR Republik Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sebaran tingkat kelayakan huni permukiman di Kelurahan Dalam

Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berdasarkan aspek kondisi bangunan Gedung dan kondisi drainase lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran tingkat kelayakan huni permukiman di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berdasarkan aspek kondisi bangunan Gedung dan kondisi drainase lingkungan.

METODE

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Kelurahan Dalam Bugis terletak pada koordinat 109°20'53"-109°21'27" BT serta 0°01'19" LU dan 0°02'10" LS Berdasarkan kondisi geografis, batas Kelurahan Dalam Bugis sebelah timur berbatasan dengan Sungai Kapuas, utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Hilir, selatan berbatasan dengan Kelurahan Tambelan Sampit dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Saigon dan Kelurahan Tanjung Hulu (Pemerintah Desa Bugis 2020) .



Gambar 2. Peta Administrasi Kelurahan Dalam Bugis

Sumber data primer berupa wawancara kepada masyarakat yang bermukim di Kelurahan Dalam Bugis dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu profil kelurahan dalam bugis, citra foto permukiman Kelurahan Dalam Bugis tahun 2021, Keputusan Walikota Pontianak Nomor 1063.1/D-PRKP/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 dan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga kegiatan secara serempak yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk tabel hasil skoring, dokumen/data-data serta lembar wawancara dari hasil identifikasi kelayakan permukiman berdasarkan Formula Penilaian Lokasi Permukiman yang ditetapkan dalam (Menteri PUPR 2018). Penentuan tingkat kelayakan huni suatu permukiman berdasarkan aspek kondisi bangunan gedung dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan pembobotan kondisi bangunan gedung berdasarkan masing-masing kriteria. Lebih lanjut pembobotan (*scoring*) berdasarkan Formula Penilaian Lokasi Permukiman yang ditetapkan melalui kriteria ketidakaturan bangunan adalah: 1) Nilai 1 (baik) untuk parameter 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan, 2) Nilai 3 (buruk) untuk parameter 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan. 3) untuk parameter 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan. Pembobotan kriteria tingkat kepadatan bangunan yaitu; 1) Nilai 1 (baik) untuk parameter 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan. 2) Nilai 3 (buruk) untuk parameter 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan. 3) Nilai 5 (sangat buruk) untuk

parameter 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan.

Selanjutnya pembobotan (*scoring*) kriteria ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan adalah: 1) Nilai 1 (baik) untuk parameter 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis. 2) Nilai 3 (buruk) untuk parameter 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis. 3) Nilai 5 (sangat buruk) untuk parameter 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis. Setelah dilakukan pembobotan penilaian aspek kondisi bangunan gedung selanjutnya dilakukan pembobotan aspek kondisi drainase lingkungan yaitu kriteria drainase lingkungan tidak tersedia adalah: 1) Nilai 1 (baik) untuk parameter 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya. 2) Nilai 3 (buruk) untuk parameter 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya. 3) Nilai 5 (sangat buruk) untuk parameter 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya.

Pembobotan kriteria drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan adalah 1) Nilai 1 (baik) untuk parameter 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun. 2) Nilai 3 (buruk) untuk parameter 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun. 3) Nilai 5 (sangat buruk) untuk parameter 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun. Pembobotan kriteria drainase lingkungan buruk adalah 1) Nilai 1 (baik) untuk parameter 25% - 50% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk. 2) Nilai 3 (buruk) untuk parameter 51% - 75% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk. 3) Nilai 5 (sangat buruk) untuk parameter 76% - 100% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk.

Nilai masing-masing aspek kondisi kemudian dijumlahkan untuk penilaian awal tingkat kelayakan huni permukiman. Range nilai dari data olahan aspek kondisi bangunan Gedung dan drainase lingkungan berjarak 0-15 yang

kemudian dikategorikan menjadi kategori kumuh ringan, sedang dan berat serta tingkat kelayakan huni menjadi permukiman layak huni, cukup layak huni dan tidak layak huni. Permukiman dengan kategori kumuh ringan (layak huni) berada pada nilai 0-5, permukiman dengan kategori kumuh sedang (cukup layak huni) berada pada nilai 6-10 dan permukiman dengan kategori kumuh berat (tidak layak huni) berada pada nilai 11-15.

Setelah didapatkan hasil tingkat kelayakan huni permukiman, peneliti menyajikan peta sebaran tingkat kelayakan huni permukiman di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menggunakan teknik *overlay* (tumpang susun), *buffer*, dan *clip* berdasarkan aspek kondisi bangunan gedung dan aspek kondisi drainase lingkungan. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas data menggunakan bahan referensi. Referensi yang dimaksud yaitu adanya pendukung yang dapat mendukung hasil penelitian yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini pendukung yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian yang dilaporkan oleh peneliti yaitu hasil wawancara untuk mendukung data hasil wawancara, hasil observasi penilaian tingkat kekumuhan dan foto dokumentasi untuk mendukung gambaran suatu keadaan yang dilaporkan peneliti.

HASIL PENELITIAN

Sebaran Tingkat Kelayakan Huni Permukiman Aspek Kondisi Bangunan Gedung

Berdasarkan formula penilaian dan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, persebaran tingkat kelayakan huni permukiman

di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

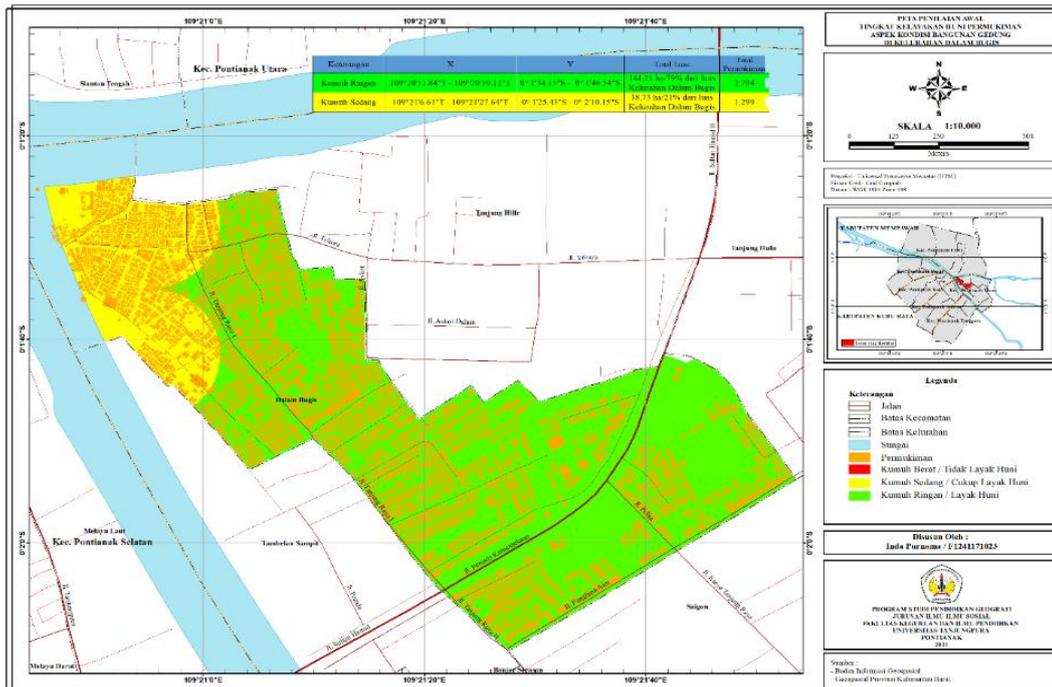
a. Permukiman Layak Huni (Kategori Kumuh Ringan)

Tingkat kelayakan huni permukiman dengan kategori kumuh ringan (layak huni) berdasarkan kriteria kondisi bangunan gedung dapat dilihat pada peta di bawah. Berdasarkan peta tersebut diketahui bahwa permukiman dengan tingkat kelayakan huni dengan kategori permukiman layak huni (kumuh ringan) berada pada 109°20'51.84"BT - 109°20'59.11"BT dan 0°1'34.15"LS - 0°1'46.54"LS dengan luas 144,21 ha. Permukiman layak huni seluas 79% dari total luas wilayah Kelurahan dengan jumlah permukiman sebanyak 2.794 rumah.

b. Permukiman Cukup Layak Huni (Kategori Kumuh Sedang)

Tingkat kelayakan huni permukiman dengan kategori kumuh sedang (cukup layak huni) berdasarkan kriteria kondisi bangunan gedung dapat dilihat pada peta di bawah. Berdasarkan peta tersebut diketahui bahwa permukiman dengan tingkat kelayakan huni dengan kategori permukiman cukup layak huni (kumuh sedang) berada pada 109°21'6.61"BT - 109°21'27.64"BT dan 0°1'25.43"LS - 0°2'10.15"LS dengan luas 38,73 ha.

Permukiman layak huni di Kelurahan ini seluas 21% dari luas wilayah Kelurahan dengan jumlah permukiman sebanyak 1.299 rumah. Lebih jelasnya sebaran tingkat kelayakan huni permukiman aspek kondisi bangunan gedung dapat dilihat pada peta berikut ini:

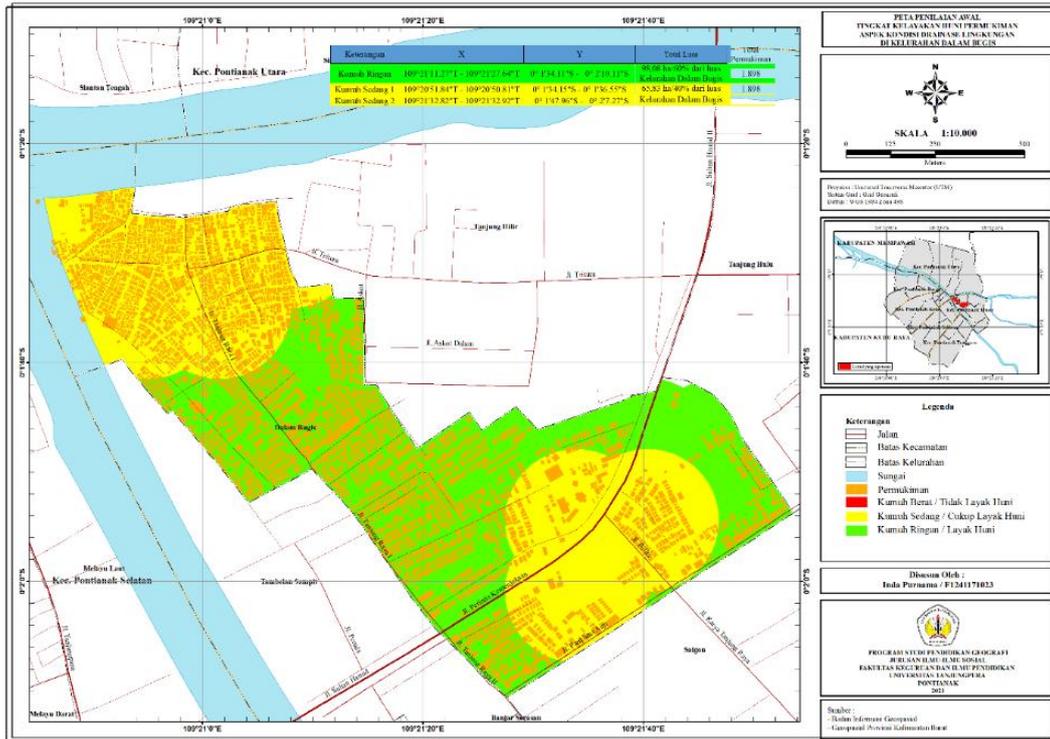


Gambar 3. Peta Tingkat Kelayakan Huni Aspek Kondisi Bangunan Gedung di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

Sebaran Tingkat Kelayakan Huni Permukiman Aspek Kondisi Drainase Lingkungan

a. Permukiman Layak Huni (Kumuh Ringan)
 Tingkat kelayakan huni permukiman dengan kategori kumuh ringan berdasarkan aspek kondisi drainase dapat dilihat pada peta di bawah. Berdasarkan peta tersebut diketahui bahwa permukiman dengan kategori layak huni berada pada 109°21'11.27"BT sampai 109°21'27.64"BT dan 0°1'34.11"LS - 0°2'10.11"LS mempunyai luas 98,08 ha. Permukiman layak huni seluas 60% dari luas wilayah Kelurahan dengan jumlah 1.898 rumah.

b. Permukiman Cukup Layak Huni (Kumuh Sedang)
 Berdasarkan peta tersebut diketahui bahwa permukiman dengan kategori cukup layak huni di Kelurahan Dalam Bugis terdapat 2 ruang. Ruang kumuh sedang 1 berada pada 109°20'51.84"BT - 109°20'50.81"BT dan 0°1'34.15"LS - 0°1'36.55"LS. Ruang kumuh sedang 2 berada pada 109°21'1.96"BT - 109°21'30.73"BT dan 0°1'47.96"LS - 0°2'7.27"LS. dengan total luas ruang kumuh sedang sebesar 65,83 ha. Permukiman cukup layak huni di Kelurahan Dalam Bugis seluas 40% dari luas wilayah Kelurahan Dalam Bugis dengan jumlah permukiman sebanyak 1.898 rumah.



Gambar 4. Peta Tingkat Kelayakan Huni Aspek Kondisi Drainase Lingkungan di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

PEMBAHASAN

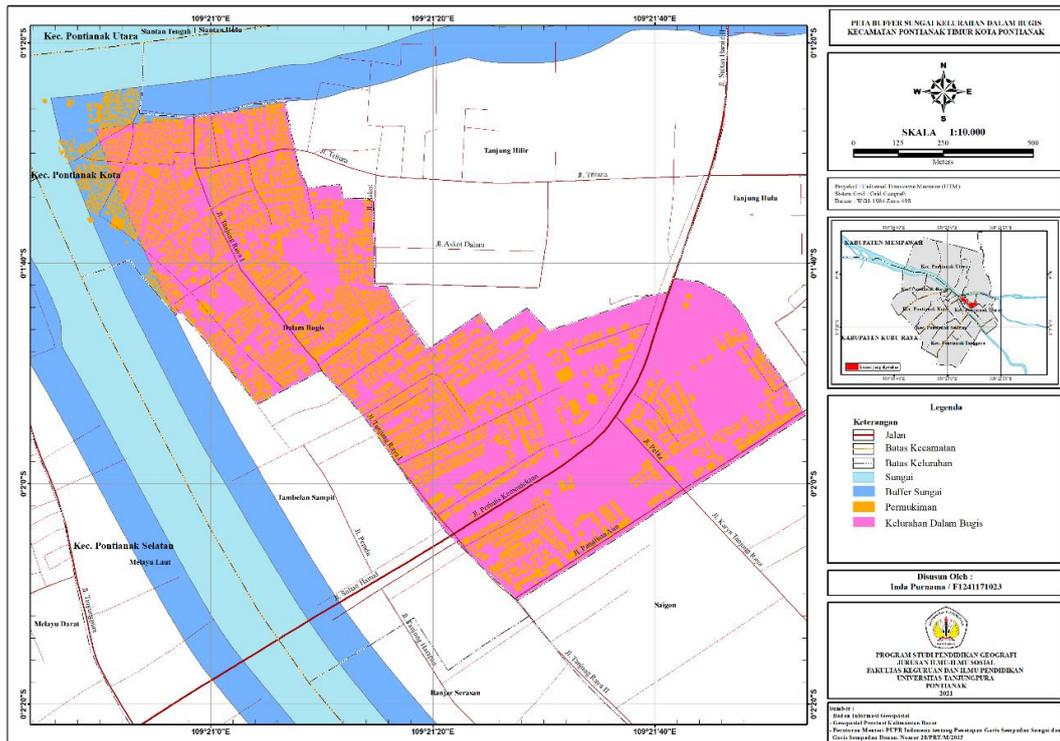
1. Sebaran Tingkat Kelayakan Huni Aspek Kondisi Bangunan Gedung

Kondisi bangunan gedung adalah aspek yang dilihat berdasarkan tingkat kepadatan, ketidakberaturan, dan ketidaksesuaian bangunan dengan persyaratan teknik. Berdasarkan indikator posisi muka bangunan hunian tidak menghadap ke jalan di ketahui bahwa ketidakberaturan dari hasil observasi dan dokumentasi, permukiman di Kelurahan Dalam Bugis merupakan permukiman dengan tingkat kelayakan huni kumuh sedang (cukup layak huni) dan kumuh ringan (layak huni).

Kriteria ketidak beraturan bangunan yang dinilai dari posisi bangunan/ hunian yang tidak menghadap ke jalan dan menghadap atau berada tepat di atas sempadan sungai. Padahal

pemerintah melalui Peraturan Menteri PUPR telah menetapkan garis sempadan sungai dengan tujuan agar: 1) fungsi sungai tidak terganggu dari aktifitas yang masyarakat di sekitarnya; 2) pemanfaatan dan peningkatan manfaat sumber daya sungai sehingga dapat memberikan benefit secara lebih optimal sekaligus menjaga sustainabilitas sungai; dan 3) menjaga daya hancur air terhadap lingkungan sekitar bantaran sungai dapat dibatasi (Menteri PUPR 2015)

Berdasarkan hasil analisis peneliti melalui citra google earth dan Arc GIS di ketahui bahwa daerah di Kawasan Kampung Beting yang berbatasan langsung dengan Sungai Landak merupakan permukiman yang dibangun di atas sempadan sungai dapat dilihat pada peta dibawah ini.



Gambar 6. Peta Buffer Sungai di Kelurahan Dalam Bugis

Sejalan dengan pernyataan tersebut dan dari pengukuran yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pada permukiman Kelurahan Dalam Bugis yaitu di RT 2/RW 11 Kawasan Kampung Beting, RT 1/RW 11 Kawasan Kampung Beting, dan RT 3/RW 11 Kawasan Kampung Beting merupakan daerah permukiman yang berada di atas sempadan sungai dengan total 425 Kepala Keluarga. Sedangkan berdasarkan indikator posisi muka bangunan melalui hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa seluruh rumah di permukiman Kelurahan Dalam Bugis menghadap ke jalan.

Kriteria tingkat kepadatan bangunan di permukiman Kelurahan tersebut yang merupakan kota metropolitan, kepadatan penduduk berada diangka >250 unit/Ha. Berdasarkan hasil analisis kepadatan bangunan menggunakan citra dan media google earth diketahui bahwa seluruh permukiman Kelurahan Dalam Bugis memiliki luas permukiman yang tidak berada diangka >250 unit/Ha.

Bangunan permukiman di Kelurahan Dalam Bugis berdasarkan data permukiman Geospasial Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 4.093 bangunan permukiman. Selanjutnya untuk

kriteria ketidaksesuaian dengan teknis bangunan, indikator atap terluas bocor, diketahui dari hasil observasi diketahui bahwa tidak terdapat permasalahan atap bocor dan dinding rusak serta tidak terdapat permukiman dengan lantai terluas berupa tanah.

Artinya berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa permukiman dengan tingkat kelayakan huni dengan kategori permukiman layak huni (kumuh ringan) berada pada 109°20'51.84"BT - 109°20'59.11"BT dan 0°1'34.15"LS - 0°1'46.54"LS dengan luas 144,21 ha. Permukiman layak huni di Kelurahan ini seluas 79% dari luas wilayah Kelurahan dengan jumlah permukiman sebanyak 2.794 rumah. Sedangkan kategori permukiman cukup layak huni (kumuh sedang) berada pada 109°21'6.61"BT - 109°21'27.64"BT dan 0°1'25.43"LS - 0°2'10.15"LS dengan luas 38,73 ha. Permukiman layak huni di Kelurahan ini seluas 21% dari luas wilayah Kelurahan dengan jumlah permukiman sebanyak 1.299 rumah.

2. Sebaran Tingkat Kelayakan Huni Aspek Kondisi Drainase Lingkungan

kondisi drainase lingkungan merupakan aspek yang dapat dilihat berdasarkan kriteria ketersediaan drainase, kualitas konstruksi drainase lingkungan, dan kemampuan sistem drainase mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak



Gambar 7. Drainase Alamiah di Kelurahan Dalam Bugis

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa drainase lingkungan dipermukiman ini untuk daerah tepian sungai dan daerah yang dilalui oleh parit merupakan drainase alamiah. Sedangkan untuk daerah yang tidak dilalui oleh parit dan sungai menggunakan drainase buatan. Suatu kawasan permukiman yang baik hendaknya diikuti dengan sistem drainase yang tertata dengan baik sehingga dapat berfungsi mengurangi bahkan membuang kelebihan air pada kawasan atau lahan tersebut sehingga tidak menimbulkan banjir yang dapat mengganggu kehidupan warga (Fairizi 2015). Hasil dokumentasi dilapangan didukung dengan wawancara kepada informan, pada kawasan permukiman yang terdapat pada lokasi penelitian terlihat bahwa sistem drainase yang ada tidak mampu mereduksi limpasan yang berasal dari air hujan sehingga banyak menimbulkan genangan pada lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan diketahui bahwa di Kelurahan Dalam Bugis, Gang Sampang, Jalan Tanjung Raya 1 terjadi genangan apabila terjadi pasang air sungai. Sedangkan pada daerah yang dilalui oleh sungai dan parit terjadi genangan akibat pasang air sungai akhir tahun pada bulan 12 dan hanya terjadi 1 kali dalam setahun. Sedangkan untuk tinggi genangan dan lama genangan di lokasi permukiman Kelurahan Dalam Bugis genangan

menimbulkan genangan. Hasil dokumentasi drainase lingkungan pada lokasi penelitian berdasarkan hasil observasi dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 8. Drainase Buatan di Kelurahan Dalam Bugis Dengan Material Pelapis
tidak sampai 50 cm dan lama genangan tidak menentu namun tidak sampai lebih dari 2 jam.

Kualitas konstruksi drainase lingkungan di kawasan permukiman Kelurahan Dalam Bugis berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih terdapat sistem drainase alamiah atau belum ada konstruksi drainase yang dibangun dengan material pelapis dan masih berupa galian tanah. Namun terdapat pula drainase alamiah yang sudah dibangun material pelapis. Drainase buatan (artificial drainage) perlu dilengkapi dengan adanya pipa-pipa dan selokan-selokan (Syarifudin 2017). Pada permukiman di Kelurahan Dalam Bugis sudah diberi material pelapis dilengkapi pula oleh pipa-pipa dan selokan-selokan.

Berdasarkan dokumentasi dan observasi yang telah dilakukan peneliti diketahui bahwa penilaian awal tingkat kelayakan huni permukiman berdasarkan aspek kondisi drainase lingkungan di permukiman Kelurahan ini dikategorikan sebagai permukiman cukup layak huni dengan kategori kumuh sedang dan permukiman layak huni dengan kategori kumuh ringan. Permukiman dengan kategori layak huni berada pada 109°21'11.27"BT - 109°21'27.64"BT dan 0°1'34.11"LS - 0°2'10.11"LS dengan luas 98,08 ha. Permukiman layak huni di Kelurahan Dalam Bugis seluas 60% dari luas wilayah Kelurahan tersebut dengan jumlah permukiman

sebanyak 1.898. Kategori cukup layak huni di Kelurahan Dalam Bugis terdapat 2 ruang.

Ruang kumuh sedang 1 berada pada 109°20'51.84"BT - 109°20'50.81"BT dan 0°1'34.15"LS - 0°1'36.55"LS. Ruang kumuh sedang 2 berada pada 109°21'1.96"BT sampai 109°21'30.73"BT dan 0°1'47.96"LS sampai

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Aspek Kondisi Bangunan Gedung permukiman di Kelurahan Dalam Bugis menunjukkan bahwa 79% (144,21 ha) masuk pada kategori kumuh ringan sehingga layak huni dan 21% (38,73 ha) masuk pada kategori kumuh sedang (kategori layak huni cukup).
2. Pada aspek Kondisi drainase lingkungan permukiman Kelurahan Dalam Bugis menunjukkan bahwa 60% (98,08 ha) masuk pada kategori sebagai kumuh ringan sehingga permukiman layak untuk dihuni dan 40% (65,83 ha) masuk pada kategori kumuh sedang sehingga (permukiman cukup layak untuk dihuni).

REFERENSI

- Akbar, M. Rizky, and Nina Novira. 2019. "Analisis Penanganan Permukiman Kumuh." 08(01):59–70.
- Alfiani, VInny. 2016. "Persepsi Masyarakat Terkait Kenyamanan Tinggal Di Pemukiman Kumuh (Studi Kasus: Pemukiman Kumuh Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)." *Swara Bhumi* 4(02):8–13.
- BPS Kota Pontianak. 2022. *Kota Pontianak Dalam Angka (Pontianak Municipality in Figure) 2022*. Vol. 4. 61710.2201. Pontianak.
- Fairizi, Dimitri. 2015. "Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang." *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan* 3(1):755–65.

0°2'7.27"LS. Dengan total luas ruang kumuh sedang sebesar 65,83 ha. Permukiman cukup layak huni di Kelurahan Dalam Bugis seluas 40% dari luas wilayah Kelurahan dengan jumlah rumah sebanyak 1.898 unit.

Hariyanto, Asep. 2017. "Strategi Penanganan Kawasan Kumuh." *Jurnal PWK Unisba*.

Kartika Puspa Dewi, Veronica A. Kumurur & Rieneke L. .. Sela. 2019. "Penentuan Kualitas Permukiman Berdasarkan Kriteria Eco-Settlement Di Kelurahan Sindulang Satu Kota Manado." *Spasial* 6(1):169–77.

Menteri PUPR. 2015. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau*. Indonesia.

Menteri PUPR. 2016. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh*. Indonesia.

Menteri PUPR. 2018. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018, Tentang Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh*. Indonesia.

Oktarini, Maya Fitri, and Tutur Lusetyowati. 2022. "Persepsi Pemukim Terhadap Kualitas Lingkungan Di Permukiman Kumuh Tepian Sungai Musi , Palembang Residents ' Perceptions Of Environmental Quality In Slum Settlements On Musi Riverbank, Palembang."

Pemerintah Desa Bugis. 2020. *Profil Kelurahan Dalam Bugis*. Pontianak: Pemerintahan Daerah.

- Rapoport, Amos. 1969. *House and Form Culture*. Engle Wood Cliffs N. J.: Prentice Hall.
- Rashid, Masud Ur. 2019. "Transformation of Housing in a Low-Income Settlement: A Study of Domestic Spaces in Ershad Nagar Resettlement Camp." *Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning* 16(June 2019):119–46. doi: 10.54028/nj201916119146.
- Ritonga, Isnar Tiurma Leonora. 2019. "Kajian Kelayakan Permukiman Di Kelurahan Aur Lingkungan IV." *Jurnal Sains Dan Teknologi ISTP* 12(01):56–66.
- Rusmawan, Rusmawan. 2018. "Pemilihan Lahan Untuk Lokasi Permukiman." *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian* 7(2):41–48. doi: 10.21831/gm.v7i2.19088.
- Shahraki, Saeed Zanganeh, Ali Hosseini, David Sauri, and Fatema Hussaini. 2020. "Fringe More than Context: Perceived Quality of Life in Informal Settlements in a Developing Country: The Case of Kabul, Afghanistan." *Sustainable Cities and Society* 63(September):102494. doi: 10.1016/j.scs.2020.102494.
- Sumaatmadja, Nursid. 1998. *Studi Geografi Suatu Pendekatan Dan Analisa Keruangan*.
- Syarifudin, A. 2017. *Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.
- Walikota Pontianak. 2020. *Keputusan Walikota Pontianak Nomor 1063.1/D-PRKP/Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Pontianak Tahun 2020*. Vol. 2. Indonesia.
- Wiarni, Suci, Windy Mononimbar, and Suryadi Supardjo. 2018. "Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Kotamobagu Timur." *Jurnal Spasial* 5(1):61–70.
- Widyawati, Laksmi. 2015. "Kenyamanan Dan Kelayakan Huni Bagi Masyarakat Permukiman Padat Di Tanah Tinggi Jakarta Pusat." *Kalibrasi* 10:55–67.